

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan

Dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi ASEAN maupun Indonesia dalam operasionalisasi ASEAN MRA *on Tourism Professionals* karena terdapat beberapa hal yang belum beroperasi seperti Sekretariat Regional untuk pengawasan implemementasi MRA dan tidak adanya pengaturan pengawasan terhadap pekerja pariwisata asing yang bekerja di negara penerima, menjadikan ASEAN MRA *on Tourism Professionals* belum sepenuhnya siap untuk dilaksanakan operasionalisasinya. Kedepannya diharapkan komitmen-komitmen dari negara-negara anggota untuk melakukan operasionalisasi mengingat pariwisata merupakan sektor integrasi prioritas untuk perwujudan ASEAN *Community* melalui ASEAN *Economic Community*.

Terkait sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata di Indonesia, ditinjau dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia telah siap dan berkomitmen untuk melaksanakan sertifikasi. Dengan adanya data peningkatan sertifikasi dan bidang kompetensi, menunjukkan bahwa Indonesia telah secara sadar dengan itikad baik ingin melakukan penyetaraan kompetensi pekerja pariwisata untuk menghadapi liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN khususnya. Dalam hal ini, fokus Indonesia terarah pada penyetaraan kompetensi pekerja pariwisata dan bukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ASEAN MRA *on Tourism Professionals*. Hal tersebut dikarenakan, pola yang terjadi adalah ASEAN mengadopsi SKKNI pariwisata Indonesia, dan Indonesia mencoba menyelaraskan SKKNI pariwisatanya dengan ACCSTP yang terlampir dalam MRA.

## 5.2. Saran

Penulis menyarankan agar Indonesia segera menyepakati *Host Country Agreement* untuk pendirian Sekretariat Regional guna terwujudnya komitmen pekerja pariwisata ASEAN yang tersertifikasi dan siap untuk liberalisasi perdagangan jasa. Penyepakatan tersebut dapat menunjukkan komitmen Indonesia terhadap terwujudnya ASEAN *Community* melalui ASEAN *Economic Community* dengan operasionalisasi ASEAN MRA *on Tourism Professionals* dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara anggota lainnya di ASEAN.

Selain itu, bagi kebaikan dan kepentingan pekerja pariwisata Indonesia sendiri, agar dilakukan perluasan kewenangan bagi LSP untuk melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi berupa pencabutan sertifikat terhadap pekerja pariwisata asing dari negara-negara anggota ASEAN yang bersertifikasi dan bekerja di negara Indonesia. Karena hingga saat ini, LSP hanya berwenang untuk melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pekerja pariwisata Indonesia, namun tidak dengan pekerja pariwisata asing yang bersertifikat ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997

Dr. Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*", PT Rajagrafindo Persada, 2014

Gillian Triggs, *International Law - Contemporary Principles and Practices*, LexisNexis Butterworths, Australia, 2010

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Sudjana, *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Falah Production, Bandung, 2001

### B. Jurnal

Alison Hook, "*Mutual Recognition Agreements in Professional Services and CEFTA Services Integration: a Report for the World Bank*", *The World Bank*, 2014

Alex J. Bellamy dan Catherine Drummond, "*The Responsibility to Protect in Southeast Asia: Between Non-Interference and Sovereignty as Responsibility*", *The Pacific Review*, Vol. 24, 2011

ASEAN Secretariat, “ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals: Handbook”, [http://www.asean.org/storage/images/2013/economic/handbook%20mra%20tourism\\_opt.pdf](http://www.asean.org/storage/images/2013/economic/handbook%20mra%20tourism_opt.pdf)

Centre for International Law National University of Singapore, ASEAN Declaration, <https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/1967%20ASEAN%20Declaration-pdf.pdf> diakses pada 14 September 2017

Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan: RPJPN 2005-2025, <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjp-2005-2025/> diakses pada tanggal 24 Desember 2017

Emma P.Y Wong, et.al, *A Model of ASEAN Collaboration in Tourism*, [http://epubs.surrey.ac.uk/534331/3/Wong\\_A%20model%20of.pdf](http://epubs.surrey.ac.uk/534331/3/Wong_A%20model%20of.pdf), University of New South Wales, Australia hlm. 3., diakses pada 8 Februari 2018

Kalypso Nicolaidis dan Gregory Shaffer, “*Transnational Mutual Recognition Regimes: Governance Without Global Government*”, University of Wisconsin Law School Legal Studies Research Paper Series No. 1007, 2005

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional*”, 2015

Pedoman Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Tahun 2017, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2016

Safari Ar Rizqi, “*Penyebab Lambatnya Penetapan Mutual Recognition Arrangement Jasa ASEAN (1995-2005)*”, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135766-T%2028006-Penyebab%20lambatnya-HA.pdf>, Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, hlm 22

Sri Wahyuni Rasulong, “*ASEAN Tourism Forum dan Peningkatan Pariwisata Indonesia, Thailand, dan Brunei Darussalam*”, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11525/SKRIPSI%20LENGKAP-FISIP-HI-SRI%20WAHYUNI%20RASULONG.pdf;sequence=1>, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 33., diakses pada tanggal 8 Februari 2018

Susanti, Ida, “*The Conflict Rules on the Protection of the Rights of Migrant Workers: A Propostion for Indonesia and ASEAN*”, Distertasi Doktor, Ulrik Huber Institute for Private International Law.

World Economic Forum, “*Insight Report: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017: Paving the way for a more sustainable and inclusive future*”, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TTCR\\_2017\\_web\\_0401.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf) diakses pada 30 Desember 2017

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Kompetensi di Bidang Pariwisata

#### **D. Instrumen Hukum Internasional**

*General Agreement on Trade in Services (GATS);*

*Charter of The Association of Southeast Asian Nations;*

*ASEAN Agreement to Facilitate Movement of Natural Person*

*ASEAN Economic Community Blueprint 2025;*

*ASEAN Framework Agreement on Services;*

*ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*

*ASEAN Tourism Agreement*

*ASEAN Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*

#### **E. Website**

ASEANup, ASEAN Infographics: Population, Market, Economy, <https://aseanup.com/asean-infographics-population-market-economy/> diakses pada tanggal 20 November 2017

ASEAN Secretariat, *History*, <http://asean.org/asean/about-asean/history/> diakses pada 14 September 2017

ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Blueprint*, <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf> hlm. 5, diunduh pada tanggal 6 September 2017.

ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Blueprint*, <http://asean.org/asean-economic-community/> diakses pada tanggal 6 September

ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Blueprint*, <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf> diunduh pada tanggal 6 September 2017.

ASEAN Secretariat, *ASEAN Framework Agreement on Services*, <http://investasean.asean.org/files/upload/Doc%2008%20-%20AFAS.pdf> diunduh pada tanggal 6 September 2017

ASEAN Secretariat, *Mutual Recognition in Services: ASEAN Professionals on the Move*, <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20MRA%20Services-2.pdf> diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017

ASEAN Secretariat, *The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967*, <http://asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/> diakses pada 1 Februari 2018

ASEANstats, *50 Years of ASEAN at a Glance*, <http://www.aseanstats.org/publication/50-years-of-asean-at-a-glance/>, diakses pada 1 Februari 2018

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Ekonomi Indonesia Triwulan III – 2017 Tumbuh 5,06%*, <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1366> diakses pada tanggal 20 November 2017

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, “*ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*”, <http://ditjenppi.kemendag.go.id/asean-framework-agreement-on-services-afas-2/> diakses pada 6 Februari 2018

Dr. Walid Abdulrahim, *Private Site for Legal Research and Studies: 5. A State as a Subject of International Law*, <https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies-in-english/5-a-state-as-a-subject-of-international-law> diakses pada tanggal 31 Januari 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Perintah, <https://kbbi.web.id/perintah> diakses pada 22 Desember 2017

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bijak>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017

Kompas.com, “*“Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi – JK*”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> diakses pada tanggal 19 Januari 2018

Kompas.com, “*Agustus 2017, Jumlah Pengangguran Naik Menjadi 7,04 Juta Orang*” <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/153940126/agustus-2017-jumlah-pengangguran-naik-menjadi-704-juta-orang> diakses pada tanggal 17 Januari 2018

Laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kerjasama Bilateral*, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-bilateral.aspx> diakses pada tanggal 6 September 2017



Laman resmi WTO, *The General Agreement on Trade in Services: An Introduction*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/serv\\_e/gsintr\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.pdf) diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017

OCED – World Bank – IOM Seminar on Trade and Migration, “A Quick Guide to the GATS and Mode 4”[https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/Trade\\_2004\\_04051004/related%20docs/quick\\_guide.pdf](https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/Trade_2004_04051004/related%20docs/quick_guide.pdf)

World Economic Forum, About <https://www.weforum.org/about/world-economic-forum> diakses pada 10 Januari 2018

World Economic Forum, *Travel and Tourism Competitiveness Report 2017*, <http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2017/> diakses pada 10 Januari 2018

World Travel and Tourism Council, “WTTC Data Gateway”, <https://www.wttc.org/datagateway/> diakses pada 30 Desember 2017

World Trade Organization, *The Most Dynamic Segment of International Trade*, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/20y\\_e/services\\_brochure2015\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/services_brochure2015_e.pdf), hlm 2, diakses pada tanggal 8 Februari 2018

World Trade Organization, “*The Most Dynamic Segment of International Trade: Trade in Services*”, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/20y\\_e/services\\_brochure2015\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/services_brochure2015_e.pdf) hlm. 3, diakses pada tanggal 4 Februari 2018

World Trade Organization, “*Principles of the Trading System*”, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm) diakses pada tanggal 4 Februari 2018

*World Trade Organization, Basic Purpose and Concepts: 1.3 Definition of Services Trade and Modes of Supply,*  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/serv\\_e/cbt\\_course\\_e/c1s3p1\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s3p1_e.htm), diakses  
pada tanggal 4 Februari 2018